

**ARAHAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
DI RW 03 KELURAHAN KAUMAN, KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
(Studi Kasus: Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang)**

**Albertus Alexandro Putra Leta¹, Ardiyanto Maksimilianus Gai², Annisaa Hamidah
Imaduddina³**

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota^{1,2,3}, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang
Jl. Bendungan Sigura-Gura No.2, Malang. Telp.(0341) 551431, 553015
Email: 023alexandro@gmail.com

ABSTRAK

Kualitas keadaan lingkungan yang tidak layak huni yaitu terbatasnya luas lahan tapi kepadatan bangunan lingkungannya sangat tinggi, rawan terhadap penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta rendahnya kualitas bangunan, prasarana lingkungan yang tidak memadai dan membahayakan bagi keberlangsungan kehidupan penghuninya merupakan ciri dari permukiman kumuh. Kelurahan Kauman RW 03 memiliki status bangunan dan status lahan bangunan masih 25% yang sudah beserfiikat pemilik, dengan SK (Surat Keputusan) pemerintah kota Malang nomor 86 tahun 2021 menetapkan Kelurahan Kauman RW 03 sebagai permukiman kumuh. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan arahan penanganan permukiman kumuh pada RW 03, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuesioner, wawancara dan studi literatur serta di analisis dengan analisis deskriptif, analisis skoring dan analisis kebijakan. Perumusan arahan penanganan ditujukan pada arahan untuk pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas kondisi permukiman. Penanganan pada permukiman kumuh RW 03 kelurahan Kauman dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan jalan, menjaga kebersihan dan perawatan bangunan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal, pemeliharaan pada sumber air bersih pembersihan rutin drainase dengan memperhatikan fungsi drainase, pemeliharaan dan peningkatan fungsi jaringan air limbah serta limbah dari MCK dengan tidak membuang nya kesungai.

Kata Kunci : Kepadatan Bangunan, Arahan Penaganan, Permukiman Kumuh, Permukiman.

ABSTRACT

The quality of environmental conditions that are uninhabitable, namely limited land area but very high density of environmental buildings, prone to social and environmental diseases, as well as low quality of buildings, inadequate environmental infrastructure and endangering the survival of the residents are characteristics of slum settlements. Kauman RW 03 Subdistrict has building status and 25% of the building land status is still owner-certified, with Malang city government SK (Decree) number 86 of 2021 designating Kauman RW 03 Subdistrict as a slum settlement. The aim of this research is to formulate directions for handling slum settlements in RW 03, Kauman Village, Klojen District. Data collection was carried out by means of observation, questionnaires, interviews and literature studies as well as analysis using descriptive analysis, scoring analysis and policy analysis. The formulation of handling directions is aimed at directing the government and community as parties involved and responsible for settlement conditions. Handling of the RW 03 slum settlement, Kauman sub-district is carried out by improving basic infrastructure to improve basic facilities such as clean water, sanitation, electricity and roads, maintaining cleanliness and maintenance of house buildings and the environment around the residence, maintenance of clean water sources, routine cleaning of drainage by paying attention drainage function, maintenance and improvement of the function of the waste water network and waste from MCK by not throwing it into the river.

Keywords : Building Density, Management Directions, Slums, Settlements

PENDAHULUAN

Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan. (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.02 Tahun 2016) Muta'ali dan Arif (2016) juga mengutarakan pendapat mereka tentang permukiman, permukiman adalah semua bentukan secara buatan maupun alami dengan segala perlengkapan yang di pergunakan oleh manusia baik secara individu maupun menetap di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang melengkapinya. Menurut Rindarjono (2012) permukiman kumuh merupakan permukiman dengan rumah yang memiliki kondisi hunian masyarakat kawasan tersebut sangat buruk. Tidak sesuainya rumah maupun sarana dan prasarana yang ada dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan tinggi, kaidah kesehatan persyaratan rumah yang tidak sesuai dan di abaikan, kebutuhan sarana air yang kurang memadai, persyaratan kelengkapan prasarana seperti sanitasi, jalan lingkungan, drainase yang sangat buruk, ruang terbuka yang hampir tidak ada serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya yang tidak mendukung.

Permukiman kumuh merupakan kualitas keadaan lingkungan yang tidak layak huni, dengan ciri-cirinya yaitu terbatasnya luas lahan namun kepadatan bangunan lingkungannya sangat tinggi, rawan terhadap penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta rendahnya kualitas bangunan, prasarana lingkungan yang tidak memadai dan membahayakan bagi keberlangsungan kehidupan penghuninya (Niken, 2014). Muta'ali(2006) dalam Muta'ali dan arif (2016:62) dalam menyebutkan, jika dikaji kerawanan lokasi permukiman kumuh terhadap kecenderungan kawasan menjadi kumuh terdapat dua faktor utama yang menjadi pendorong kawasan akan menjadi kumuh. Faktor faktor tersebut adalah faktor management kawasan dan faktor penarik ekonomi. Biasanya untuk kawasan kumuh menempati lokasi di lahan lahan pemerintahan management kawasan tersebut tidak terdefinisi dengan jelas, ditinjau dari tata ruang kota, lahan lahan tersebut sangat keras dilarang unuk berdirinya permukiman atau merupakan kawasan ilegal. Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi

dengan pertumbuhan dan perkembangan kotanya yang cukup pesat. Hal ini menimbulkan permasalahan pada munculnya permukiman-permukiman kumuh yang ada di Kota Malang. Menurut SK kumuh Kota Malang (2021), Kota malang memiliki total luasan Kawasan kumuh sebesar 608,6 Ha yang tersebar di setiap kelurahannya. Adapun salah satu permukiman kumuh yang ada dikota malang salah satunya ada dikelurahan kauman.

Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang merupakan salah satu diantara 11 kelurahan di wilayah administrasi Kecamatan Klojen yang secara geografis terletak di kawasan pusat Kota Malang. Hal ini bisa dilihat dari jarak Pusat Pemerintahan Kota Malang dengan Pusat Pemerintahan Kelurahan Kauman yang hanya berjarak tidak lebih dari 1.5 km. Secara Administratif Kelurahan Kauman terbagi menjadi 10 RW dan 67 RT, dimana dari 10 RW tersebut ada 1 RW diantaranya adalah :RW 03. Tentunya ini sangat tidak aman dan sangat rawan terhadap bencana alam seperti banjir maupun tanah longsor. Khususnya di wilayah RW 03 sendiri hampir sebagian warganya bertempat tinggal di bantaran Sungai Brantas. Banyaknya rumah tidak layak huni disana menjadikan daerah di bantaran sungai Brantas ini menjadi kawasan kumuh yang dimana dalam penataan bangunannya sangat tidak memperhatikan aspek lingkungan. Dengan kehidupan seperti ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Kelurahan Kauman maupun dari Pemerintah Kota Malang dalam aspek kehidupan yang lebih layak. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dalam hal ini peneliti ingin mengkaji mengenai "Arahan penanganan permukiman kumuh di RW 03 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen".

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk munyusun arahan penanganan tingkat permukiman kumuh dan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab tingkat kekumuhan.

Berdasarkan tujuan penelitian yang di kemukakan, maka di tentukan sasaran pokok dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Karakteristik permukiman kumuh yang terdapat pada RW 03, Kelurahan Kauman , Kecamatan Klojen.
2. Mengidentifikasi tingkat kekumuhan yang terdapat pada RW 03, Kelurahan Kauman , Kecamatan Klojen.

3. Merumuskan arahan penanganan permukiman kumuh pada RW 03, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Permukiman Kumuh

Menurut Undang-undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pasal 1 permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena bangunan yang padat dan tidak teratur dan juga kurangnya kualitas sarana dan prasarana. Sedangkan Cities Alliance Action Plan dalam buku *The Challenge of Slums* tahun 2003 mendefinisikan permukiman kumuh sebagai bagian kota yang terabaikan dengan kondisi yang buruk mulai dari rumah-rumah petak yang padat di pusat kota hingga permukiman liar. Kota-kota di Indonesia pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan, bahkan yang terjadi justru sebagian kawasan perkotaan mengalami penurunan lingkungan yang berpotensi menciptakan slums area (kumuh). Akibatnya, muncul slums area (kumuh) di beberapa wilayah kota merupakan hal yang tidak dapat dihindari yaitu tidak direncanakan oleh pemerintah tetapi slum area (kumuh) ini tumbuh secara alami. Rudiyanono (2000) menyebutkan dua standar permukiman kumuh, yaitu:

1. Ditinjau dari keadaan kondisi rumahnya antara lain dilihat dari struktur rumah, pemisahan fungsi ruang, kepadatan hunian/rumah dan bangunan serta tatanan bangunan.
2. Ditinjau dari ketersediaan prasarana dasar lingkungan, seperti air bersih, sanitasi, ketersediaan fasilitas tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sarana ekonomi, ada tidaknya ruang terbuka di luar perumahan. Studi ini tidak mempertimbangkan kriteria non fisik seperti kerentanan status penduduk untuk melihat tingkat tingkat kekumuhan permukiman.

Rindrojono (2013) menjelaskan bahwa kumuh adalah gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan rendah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Menurut Sinulingga (2005) ciri-ciri kampung/permukiman kumuh terdiri dari:

1. Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/Ha. Pendapat para ahli perkotaan menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah mencapai 80 jiwa/Ha maka timbul masalah akibat kepadatan ini, antara perumahan yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan fisiologis, psikologis dan perlindungan terhadap penyakit.
2. Jalan-jalan sempit dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembunyi dibalik atapatap rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain.
3. Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan biasa terdapat jalanjalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air.
4. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim. Ada diantaranya yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah.
5. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan.
6. Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umumnya tidak permanen dan sangat darurat.
7. Pemilikan hak atas lahan sering legal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa.

Dari definisi – definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kawasan kumuh adalah wilayah permukiman yang berkepadatan tinggi, miskin, kurang terpenuhinya akses pada infrastruktur dan sewa lahan yang tidak aman. Adapun beberapa masalah yang sering ditemui dalam wilayah slums ini seperti kekumuhan, sarana dan prasarana yang terbatas, dan kriminalitas yang tinggi sehingga mempengaruhi perkembangan daerah sekitarnya.

Tabel 1. Ciri-Ciri Permukiman Kumuh

Teori/Sumber	Variabel
Sinulingga (2005)	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/Ha • Jalan-jalan sempit • Fasilitas drainase sangat tidak memadai • Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim. • Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim • Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada

	umunya tidak permanen dan sangat darurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilikan hak atas lahan sering lega
	<ul style="list-style-type: none"> • Keadaan kondisi rumahnya antara lain dilihat dari stuktur rumah, pemisahan fungsi ruang, kepadatan hunian/rumah dan bangunan serta tatanan bangunan.
Rudiyantono (2000)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan prasarana dasar lingkungan, seperti air bersih, sanitasi, ketersediaan fasilitas tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sarana ekonomi, ada tidaknya ruang terbuka di luar perumahan

B. Karakteristik Permukiman Kumuh

Suatu kawasan permukiman dapat dikatakan kumuh berdasarkan kondisi kawasan tersebut yang tidak memenuhi standar baik yang telah ditetapkan pemerintah maupun penilaian orang secara subjektif. Pada umumnya pendefinisian atau standar penentuan kawasan kumuh memiliki beberapa kesamaan baik secara fisik, sosial, ekonomi maupun dari segi pelayanan publik yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai karakteristik kawasan kumuh.

Buku *The Challenge of Slums* tahun 2003 menyebutkan karakteristik kawasan kumuh dirincikan sebagai berikut:

1. Kurangnya Layanan Dasar Karakteristik yang paling sering ditemui pada wilayah kumuh adalah sanitasi dan sumber air yang kurang baik atau bahkan tidak ada, selain itu juga dapat ditemukan masalah lain seperti tidak baiknya sistem persampahan, tidak adanya aliran listrik, kondisi jalan yang buruk dan penerangan jalan umum tidak ada, dan tidak adanya saluran drainase.
2. Perumahan Dibawah Standar atau Struktur Bangunan Ilegal dan Tidak Memadai Wilayah kumuh jika dilihat dari struktur bangunannya dibawah standar yang telah ditetapkan oleh wilayah tersebut, lokasi dan iklim yang tidak cocok untuk dibangun tempat tinggal (perumahan) dan berbagai pelanggaran atas peraturan ruang dan perumahan lainnya yang berlaku di wilayahnya. Juga dapat bergantung kepada material bangunan yang digunakan tidak baik untuk bahan bangunan tempat tinggal

- ataupun bangunan tempat tinggal yang dibuat semi permanen.
3. Kepadatan Tinggi Kepadatan tinggi apabila satu bangunan (rumah) memiliki banyak unit hunian (kamar), ruang yang rendah per orang dan satu unit hunian (satu kamar) dihuni oleh lima orang atau lebih dengan penggunaan unit yang digunakan untuk memasak, tidur dan kegiatan sehari-hari lainnya.
 4. Kondisi Hidup yang Tidak Sehat dan Lokasi yang Berbahaya Rumah yang dibangun dilokasi yang tidak layak untuk permukiman, misalnya dataran banjir, di daerah industri dengan emisi beracun, tempat pembuangan limbah dan pada area rawan bencana (terutama longsor). Selain itu juga karena kurangnya layanan dasar seperti saluran pembuangan yang terbuka, pembuangan sampah yang tidak terkendali dan lingkungan yang tercemar.
 5. Tidak Ada Kepemilikan, Permukiman Tidak Teratur atau Informal Tidak adanya dokumen resmi atas kepemilikan tanah ataupun bangunan yang dijadikan tempat tinggal, daerah permukiman tidak terencana, ketidak patuhan atas peraturan (rencana) penggunaan lahan dan berbagai definisi lainnya yang pada umumnya dapat dikatakan bangunan informal (bangunan liar) sebagai salah satu indikasi permukiman kumuh.
 6. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Kemiskinan dan kesenjangan sosial tidak dilihat sebagai karakteristik permukiman kumuh, melainkan menjadi salah satu akibat dari adanya permukiman kumuh. Pengucilan sosial yang sering terjadi adalah pandangan bahwa wilayah kumuh sebagai tempat dari sumber kejahatan yang terjadi.
 7. Luasan Minimum Permukiman Permukiman membutuhkan luasan minimum agar dapat dikatakan sebagai permukiman kumuh yang pada setiap wilayah memiliki standar yang berbeda. Contohnya di Kota-kota membutuhkan minimal 700m² untuk pondok, atau di India yang membutuhkan setidaknya 300 orang atau 60 rumah tangga yang tinggal di klaster permukiman. Indonesia sendiri mempunyai pandangan atas karakteristik permukiman kumuh yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR No.2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh, yang menyatakan bahwa:

- a. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman yang mengalami degradasi kualitas;
- b. Kondisi bangunan memiliki kepadatan tinggi, tidak teratur dan tidak memenuhi syarat;
- c. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (batasan sarana dan prasarana ditetapkan dalam lingkungan hidup keciptakaryaannya), yaitu:
 - a) Jalan Lingkungan
 - b) Drainase Lingkungan
 - c) Penyediaan Air Bersih/Minum
 - d) Pengelolaan Persampahan
 - e) Pengelolaan Air Limbah
 - f) Proteksi Kebakaran

Karakteristik permukiman kumuh menurut Silas (1996) adalah sebagai berikut:

1. Keadaan rumah pada permukiman kumuh terpaksa dibawah standar, rata-rata 6 m²/orang. Sedangkan fasilitas kota secara langsung tidak terlayani karena tidak tersedia. Namun karena lokasinya dekat dengan permukiman yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya.
2. Permukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat mencari nafkah (opportunity value) dan harga rumah juga murah (asas keterjangkauan) baik membeli atau menyewa.

Manfaat permukiman disamping pertimbangan lapangan kerja dan harga murah adalah kesempatan mendapatkannya atau aksesibilitas tinggi.

Tabel 2. Karakteristik Permukiman Kumuh

Teori/Sum ber	Variabel
Buku The Challenge of Slums tahun 2003	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Layanan Dasar • Karakteristik Perumahan Dibawah Standar atau Struktur Bangunan Ilegal dan Tidak Memadai • Wilayah kumuh • Kepadatan Tinggi • Kondisi Hidup yang Tidak Sehat • Tidak Ada Kepemilikan • Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial • Luasan Minimum Permukiman

Silas (1996)

- Keadaan rumah pada Permukiman kumuh terpaksa dibawah standar, rata-rata 6
- Permukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat mencari nafkah (opportunity value) dan harga rumah juga murah (asas keterjangkauan) baik membeli atau menyewa.

C. Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh

Menurut Rindrojono (2013) faktor – faktor yang menyebabkan tumbuhnya di permukiman kumuh di daerah perkotaan, yakni:

1. Faktor Urbanisasi

Urbanisasi adalah substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosioekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa-jasa. Proses urbanisasi ini merupakan suatu gejala umum yang di alami oleh negara-negara yang sedang berkembang dan proses urbanisasi ini berlansung pesat di karenakan daya tarik daerah perkotaan yang sangat kuat, baik yang bersifat aspek ekonomi maupun yang bersifat non ekonomi. Selain itu, daerah pedesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatkan arus urbanisasi ke kota-kota besar. Kota yang mulai padat penduduk dengan penambahan penduduk tiap tahunnya melampaui penyediaan lapangan pekerjaan yang ada di daerah perkotaan sehingga menambah masalah baru bagi kota. Tekanan ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi bagi para penduduk yang urbanisasi dari desa, memaksa para urbanisasi ini untuk tinggal di daerah pinggiran sehingga akan terjadinya lingkungan yang kumuh dan menyebabkan banyaknya permukiman liar di daerah pinggiran ini.

2. Faktor Lahan Perkotaan Lahan di daerah perkotaan semakin hari luas lahannya berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang melonjak drastis dari tahun ke tahun, ini merupakan permasalahan yang di hadapi di daerah perkotaan sehingga masalah perumahan di daerah perkotaan

merupakan masalah serius yang dihadapi daerah perkotaan. Permasalahan perumahan sering disebabkan karena ketidakseimbangan antara penyediaan unit rumah bagi orang yang berekonomi lemah dan kaum yang tergolong ekonomi mampu di daerah perkotaan. Sehingga banyak masyarakat yang berekonomi lemah hanya mampu tinggal di unit-unit hunian di permukiman yang tidak layak.

3. Faktor Prasarana dan Sarana Kondisi sarana dan prasarana dasar di permukiman seperti air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan, ruang terbuka hijau, dan pasar tidak memenuhi standar dan tidak memadai sehingga menyebabkan permukiman tersebut bisa menjadi kumuh.
4. Faktor Sosial dan Ekonomi Penghuni lingkungan permukiman kumuh sebagian besar mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini yang menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar. Selain itu, ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni menambah permasalahan permukiman di daerah perkotaan.
5. Faktor Tata Ruang Tata ruang permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk struktur ruang kota. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota harus didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya termasuk daya dukung yang relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh. Jika salah pemahaman dan pemanfaatan ruang kota akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi mendorong tumbuh kembangnya lingkungan permukiman kumuh atau tumbuhnya permukiman kumuh baru di daerah perkotaan, bahkan jadi akan menghapus lingkungan permukiman lama tau kampung-kampung kota yang mempunyai nilai warisan budaya tinggi.

METODE PENELITIAN

A. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang berjudul arahan penanganan permukiman kumuh di RW 03, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen dalam menjalankan penelitian ini peneliti menggunakan 2 metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Dalam pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data primer dibagi menjadi beberapa bagian yakni observasi lapangan, menyebarkan kuesioner dan wawancara guna untuk mengambil data berupa data fisik yang didapatkan dari narasumber sedangkan metode pengumpulan data sekunder berupa data yang didapatkan dari instansi terkait judul penelitian yakni arahan penanganan Kecamatan Klojen.

B. Metode Analisis Data

Dalam penelitian mengenai arahan penanganan permukiman kumuh di RW 03, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen menggunakan 3 alat analisis yang dimana disesuaikan dengan sasaran penelitian. 3 alat analisis tersebut adalah analisis skoring baseline, analisis regresi linier berganda dan analisis kebijakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut ini mengenai alat analisis yang digunakan dalam penelitian arahan penanganan permukiman kumuh di RW 03, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen.

1. Analisis Deskriptif

Metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada lingkungan tempat penelitian dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Metode ini digunakan untuk menganalisis hasil wawancara dan observasi. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang terkumpul secara sistematis, faktual dan cermat terhadap fakta atau karakteristik yang diteliti untuk dapat disajikan. Pada analisis ini akan mendeskripsikan secara kuantitatif dalam bentuk persentase hasil dari kuesioner terstruktur mengenai variabel karakteristik yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 3. Karakteristik Permukiman

No	Karakteristik Pemukiman
1	Kondisi bangunan
2	Keteraturan bangunan
3	Kepadatan bangunan
4	Kualitas bangunan

5	Jalan
6	Penyediaan air minum/air bersih
7	Drainase
8	Pengelolaan air limbah
9	Pengelolaan sampah

2. Analisis Skoring

Untuk menjawab rumusan masalah ini dipergunakan skoring berdasarkan kriteria PERMEN PUPR NO.2/PRT/M/2016. Skoring ini adalah proses penentuan skor atas jawaban responden yang dilakukan dengan membuat klasifikasi berdasarkan menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

3. Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengelompokkan kawasan permukiman yang sesuai dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (Kumuh/Slum dan Squatter).
2. Membuat daftar kebutuhan penanganan baik itu dalam konteks pencegahan maupun permukiman kumuh ilegal.
3. Merumuskan tujuan dan sasaran pengembangan permukiman berlandaskan kondisi, potensi, dan permasalahan kota/perkotaan dan kawasan.
4. Merumuskan arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dalam bentuk matriks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kecamatan Klojen

Klojen adalah sebuah kecamatan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Lowokwaru dan Blimbing, Sebelah timur dengan kecamatan Kedungkandang, selatan dengan kecamatan Sukun Sebelah barat dengan kecamatan Sukun dan Lowokwaru. Selain itu daerah ini terletak di 112 26.14 hingga 112 40.42 Bujur Timur dan 077 36.38 hingga 008 01.57 Lintang Selatan. Secara administratif, Kecamatan Klojen dikelilingi oleh empat kecamatan lainnya yang ada di Kota Malang.

- Sebelah utara, Kecamatan Klojen berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing.

- Sebelah timur, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedungkandang.
- Sebelah selatan, Kecamatan Klojen berbatasan dengan Kecamatan Sukun.
- Sebelah barat, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru.

Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah Kecamatan Klojen dapat di lihat dari tabel luas wilayah berikut ini.

Tabel 4. Luas Wilayah Kecamatan Klojen

No	Kelurahan	Luas Wilayah
1	Bareng	108,92
2	Gadingkasri	87,98
3	Kasin	95,23
4	Kauman	83,09
5	Kidul Dalem	48,15
6	Klojen	79,67
7	Oro Oro Dowo	134,31
8	Penanggungan	76,40
9	Rampal Celaket	49,38
10	Samaan	51,43
11	Sukoharjo	60,28
Total		874,84

2. Kelurahan kauman

Kelurahan Kauman adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030, kawasan Kauman yang dekat dengan alun-alun dijadikan sebagai pusat Kota yang merupakan fungsi vital kota, dengan pengembangan pelayanan berupa pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana olahraga dan peribadatan. Kelurahan Kauman memiliki luas wilayah 8.125 Km dan didalamnya terdiri dari 10 RW dan berbatasan dengan 4(empat) kelurahan lainnya.

Adapun batasan wilayah kelurahan kauman sebagai berikut :

- Sebelah utara berbataan dengan Kelurahan Oro-oro Dowo
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kasin
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bareng
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kidul Dalem.

3. Kondisi Permukiman Kelurahan Kauman

Kondisi permukiman di Kelurahan Kauman lebih tepatnya di RW 03 dengan kondisi permukiman yang realitif padat dikarenakan

salah satu faktornya adalah minimnya lahan yang tersedia sehingga masyarakat luar maupun dari dalam menetap di Kelurahan Kauman RW 03. Dan diketahui permukiman yang ada di Kelurahan Kauman RW 03 memiliki status bangunan dan status lahan bangunan masih 25% yang sudah beserfiikat pemilik, maka dengan itu sesuai dengan SK (Surat Keputusan) no 86 tahun 2021 penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kota malang menetapkan Kelurahan Kauman RW 03 sebagai permukiman kumuh.

a. Kondisi Bangunan

Kondisi fisik bangunan adalah keadaan fisik bangunan pada lokasi penelitian. Kondisi fisik bangunan yang akan dibahas mulai dari keteraturan bangunan, kepadatan bangunan, dan kualitas bangunan. Keteraturan bangunan dapat dilihat pada perumahan formal, dimana orientasi umumnya menghadap jalan, ukuran bangunan dan lahan walaupun berbeda – beda tetapi memiliki pola tipe yang jelas serta keteraturan pola tertentu. Keteraturan bangunan juga dilihat dari orientasi, ukuran, dan bentuk bangunan. Kepadatan bangunan ditentukan dengan jumlah unit bangunan terhadap satuan luas (Ha). Kualitas bangunan rumah dilihat dari bahan struktur bangunan atap, dinding dan lantai beserta kondisinya. Sesuai dengan kondisi di lapangan, kualitas bangunan dibedakan menjadi 4 bagian yakni bangunan yang tergolong permanen baik, permanen buruk, non permanen baik, non permanen buruk. Bangunan yang tergolong dalam permanen baik adalah bangunan yang kondisinya memiliki bahan struktur bangunan atap berupa genteng atau asbes, dinding dari batu bata atau batako, lantai berbahan keramik, dan ubin atau plasteran semen serta dalam kondisi baik.



Gamabar 1. Bangunan Rw 03

b. Jaringan Air minum

Jaringan air minum yang terdapat di Kelurahan Kauman, dari RT 01 sampai dengan RT 06, memenuhi kebutuhan air bersihnya, untuk berbagai keperluannya, seperti kebutuhan rumah tangga dan konsumsi, memiliki 2 sumber jaringan air minum, yakni PDAM dan air tanah

atau sumur galian, yang sering dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan air minum, terkadang masyarakat Kelurahan Kauman, yang terdiri dari warga RT 01 sampai dengan warga RT 06 memanfaatkan airisi ulang, yang didapatkan dari masjid Q- Jami



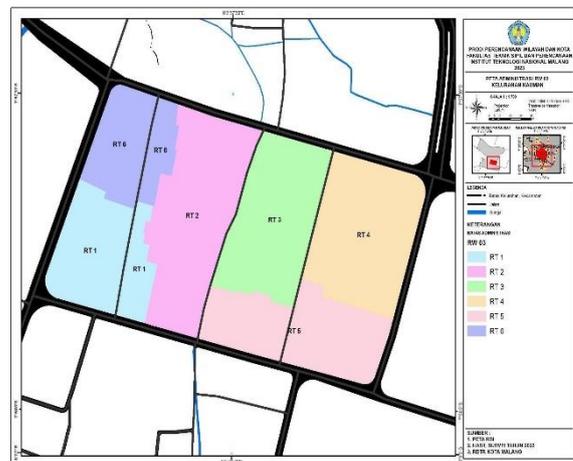
Gamabar 2. Pemenuhan Air Minum Kelurahan Kauman RW 03

c. Jaringan Persampahan

Jaringan persampahan di Kelurahan Kauman RW 03 memiliki sistem pengangkutan yang cukup baik dikarenakan sifat pelayannya dari pengangkutanya dari jam 06:00 pagi, dan akan di kumpulkan di TPS Kelurahan Kasin dan sistem pengangkutannya menggunakan gerobak yang nantinya akan dikumpulkan di truck pengumpul. Dan dikatakan sifat pelayanan cukup baik dikarenakan ada beberapa RT yang sistem pengangkutannya masih belum sesuai jadwal pengangkutannya sehingga menyebabkan sampah yang berserakan di sekitaran anak sungai.



Gamabar 3. Sistem Persampahan Kelurahan



Peta 1. Admin RW03 Kelurahan Kauman

B. Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Pada RW.03, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen

Permukiman yang ada di Kelurahan Kauman, RW.03, memiliki status bangunan serta status lahan bangunan yang masih 25% yang sudah beseffektif pemilik. Maka dengan itu, sesuai dengan SK (Surat Keputusan) no.86 tahun 2021, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Malang menetapkan Kelurahan Kauman, RW.03, sebagai permukiman kumuh. Dari hasil observasi dan wawancara, bahwa diwilayah Kelurahan Kauman, dalam mengidentifikasi kondisi permukiman kumuh, variabel RTH (ruang terbuka hijau) dan proteksi kebakaran tidak terdapat pada eksisting permukiman.

a) Bangunan Gedung

Kondisi bangunan gedung di RT.01 sampai RT.06 rata-rata memiliki kondisi bangunan yang cukup baik, dikarenakan bangun gedung dikawasan RT.01 sampai RT.06 rata-rata penduduk menggunakan atap dengan material genteng, dinding dengan material tembok batu merah, lantai menggunakan material keramik. Sedangkan, tinggi ventilasi 2 meter dari permukaan lantai. Dan pada kondisi bangunan gedung kumuh ringan, rata-rata penduduk menggunakan atap dengan material genteng beserta plafon, dinding dengan material tembok sempurna dan tinggi ventilasi 2,5-3 meter dari permukaan lantai.



Gambar 4. Bangunan Gedung

• Keteraturan Bangunan

Keteraturan bangunan umumnya, dapat dilihat pada perumahan formal, dimana orientasi umumnya menghadap jalan, ukuran bangunan dan lahan memiliki perbedaan, tetapi memiliki pola dan tipe yang jelas, serta keteraturan pola tertentu. Berikut merupakan keteraturan bangunan di RW.03, Kelurahan Kauman.

Tabel 5. Keteraturan Bangunan Di RW 03

No.	RT	Bangunan (Unit)
-----	----	-----------------

	Teratur	Tidak Teratur
1. RT 01	18	28
2. RT 02	44	67
3. RT 03	43	44
4. RT 04	20	15
5. RT 05	21	27
6. RT 06	29	17
Jumlah	175	198
Presentase	38%	62%

• Kepadatan Bangunan

Kepadatan bangunan ditentukan dengan jumlah unit dari bangunan terhadap satuan luas (Ha). Berikut klasifikasi kepadatan bangunan yang ada di RW.03, Kelurahan Kauman.

Tabel 6. Kepadatan Bangunan RW 03

RT	Luas RT (Ha)	Luas Bangunan (Ha)	Jumlah Bangunan	Kepadatan Bangunan/Ha	Klasifikasi Kepadatan
RT 1	0,82	0,39	46	20,8	Sangat Tinggi
RT 2	1,2	0,65	11	18,4	
RT 3	1	0,52	87	19,1	
RT 4	1,08	0,65	35	16,7	
RT 5	0,94	0,43	48	21,9	
RT 6	0,64	0,33	43	19,7	
Luas	5,69	2,98	370	11,66	

• Kualitas Bangunan

Kualitas bangunan rumah dilihat dari bahan struktur bangunan atap, dinding, lantai, beserta kondisinya. Sesuai dengan kondisi dilapangan, kualitas bangunan dibedakan menjadi 4 bagian, yakni bangunan yang tergolong permanen baik, permanen buruk, non permanen baik, dan non permanen buruk. Bangunan yang tergolong dalam permanen baik adalah bangunan yang kondisinya memiliki bahan struktur bangunan atap berupa genteng atau asbes, dinding dari batu bata atau batako, lantai berbahan keramik, dan ubin atau plasteran semen, serta dalam kondisi baik.

Tabel 6. Kualitas Bangunan Di RW 03

No.	RT	Permanen		Non Permanen	
		Baik	Buruk	Baik	Buruk
1.	RT 01	4	5	-	-
2.	RT 02	105	6	-	-
3.	RT 03	8	5	-	-
4.	RT 04	3	4	-	-

5.	RT 05	4	3	-	-
6.	RT 06	4	3	-	-
Jumlah		344	26	0	0
Presentase		93,00%	7,03%		



Gambar 5. Bangunan Permanen baik Di RW 03

Bangunan yang tergolong dalam permanen buruk adalah bangunan yang memiliki bahan atap berupa genteng atau asbes dalam kondisi bocor, dinding atau batako dalam keadaan lembab, lantai dari kramik atau berupa plesteran semen.



Gambar 6. Bangunan Permanen Buruk Di RW.03

Tabel 7. Analisis Bangunan Rumah

No.	Pertanyaan	Indikator	Keterangan
1.	Bangunan yang terdapat di lingkungan Kauman RW.03?	Atap	<p>Hasil observasi :</p> <p>a. Genteng dengan kondisi baik</p> <p>b. Seng dengan kondisi baik</p> <p>Hasil observasi :</p> <p>Baik : tidak ada keretakan dengan rata-rata menggunakan material beton, plesteran semen</p> <p>Sedang : dengan plesteran semen</p>
		Ventilasi	<p>Hasil observasi :</p> <p>Kondisi ventilasi dikategorikan baik</p>
		Jendela	<p>Hasil observasi :</p> <p>Kondisi jendela dikategorikan baik</p>
		Lantai	<p>Hasil observasi :</p> <p>Kondisi lantai dikategorikan baik dengan berbahan keramik.</p>

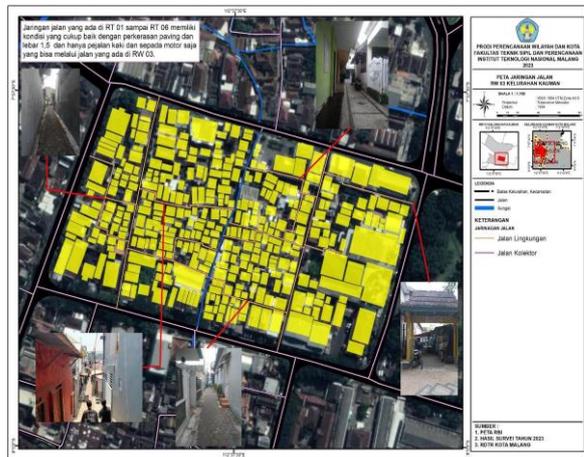
2.	Bagaimana status legalitas tanah yang terdapat di lingkungan RW.03?	Berdasarkan hasil wawancara dan observasi status legalitas tanah di lingkungan Kelurahan Kauman, RW.03, rata-rata memiliki status legalitas tanah milik sendiri.
----	---	--

b) Jaringan jalan

Jaringan jalan yang ada di RT 01 sampai RT 06 memiliki kondisi yang cukup baik dengan perkerasan paving dan lebar 1,5 dan hanya pejalan kaki dan sepeda motor saja yang bisa melalui jalan yang ada di RW.03, Kelurahan Kauman.



Gambar 7. Jaringan Jalan Di RW.03



Peta 2. Jaringan Jalan

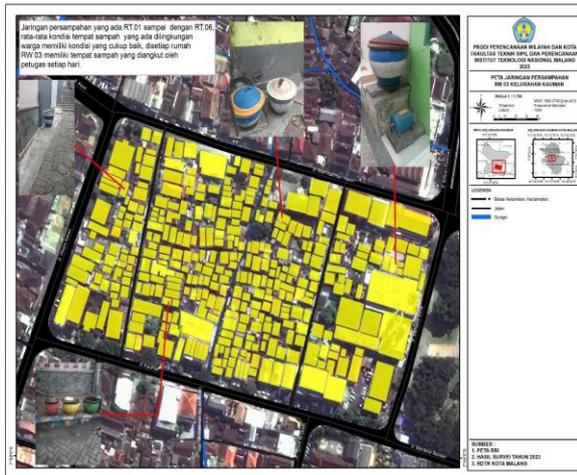
c) Jaringan Persampahan

Jaringan persampahan yang ada RT.01 sampai dengan RT.06, rata-rata kondisi tempat sampah yang ada di lingkungan warga memiliki kondisi yang cukup baik. Jaringan persampahan di Kelurahan Kauman, RW.03, memiliki sistem pengangkutan yang cukup baik, dikarenakan sifat pelayannya dari pengangkutan, dan akan dikumpulkan di TPS Kelurahan Kasin. Sistem pengangkutannya menggunakan gerobak yang nantinya akan dikumpulkan ditruck pengumpul sampah. Beberapa wilayah RT yang sistem

pengangkutannya masih belum sesuai dengan jadwal pengangkutannya menyebabkan sampah berserakan disekitaran anak sungai, contohnya di RT 02.



Jaringan Persampahan RW.03



Peta 3. Jaringan Persampahan RW 03

C. Identifikasi Tingkat Kekumuhan Di RW.03, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen

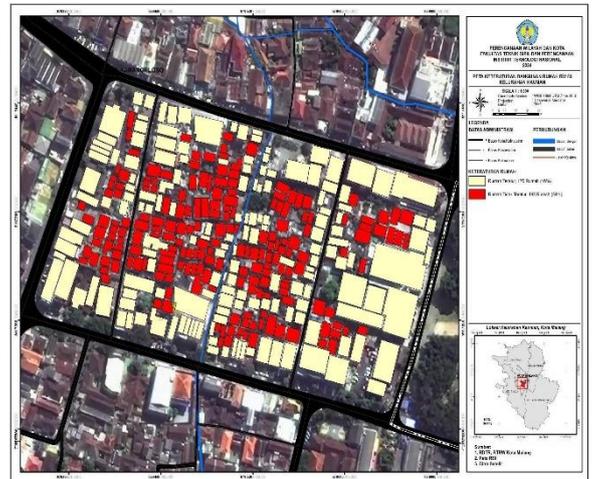
a) Kondisi Bangunan Gedung

Dari keseluruhan jumlah responden tingkat kekumuhan kondisi bangunan gedung pada kumuh sedang 40, kumuh ringan 10. Berdasarkan data yang diambil dari tingkat kekumuhan gedung pada kumuh sedang, rata-rata penduduk menggunakan atap dengan material genteng, dinding dengan material tembok batu merah, lantai menggunakan material keramik, sedangkan tinggi ventilasi 2 meter dari permukaan lantai. Dan pada kondisi bangunan gedung kumuh ringan, rata-rata penduduk menggunakan atap dengan material genteng beserta plafon, dinding dengan material tembok sempurna dan tinggi ventilasi 2,5-3 meter dari permukaan lantai.

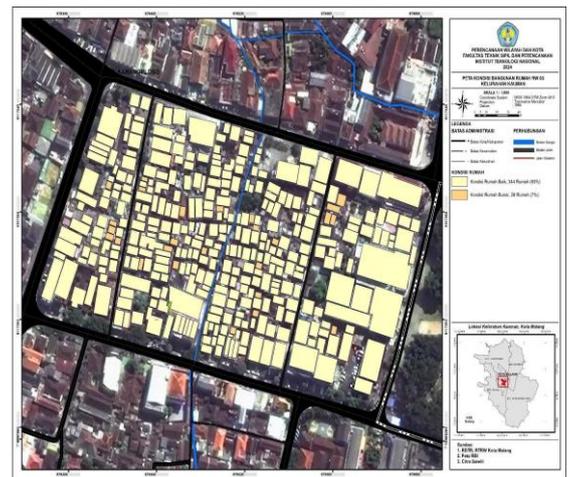


Tabel 5.17 Kuesioner Penilaian Pada Kondisi Jalan Lingkungan

No	Nama Responden	Alamat RT/ RW	Jumlah anggota keluarga	Etnis suku	Nama Jalan	Penilaian tingkat kekumuhan Lingkungan		
						kumuh berat	kumuh sedang	kumuh ringan
1	Bapak Yuladi	RT 02	5 Orang	Jawa	Jl. AR Hakim		1	
2	Bapak Dewa	RT 02	4 Orang	Jawa	Gang 3 Kuaman		1	
3	Bapak Rahman	RT 02	4 Orang	Jawa	Gang 3 Kuaman		1	
4	Bapak Edi	RT 02	3 Orang	Jawa	Gang 3 Kuaman			1
5	Bapak Denu	RT 02	4 Orang	Jawa	Jl. AR Hakim		1	
6	Ibu Shorda	RT 02	3 Orang	Jawa	Gang 3 Kuaman		1	
7	Bapak Nanas	RT 02	2 Orang	Jawa	Jl. AR Hakim		1	
8	Bapak Pai	RT 02	3 Orang	Jawa	Jl. AR Hakim		1	
9	Ibu Leny	RT 02	4 Orang	Jawa	Gang 3 Kuaman		1	
10	Bapak Kevi	RT 02	3 Orang	Jawa	Gang 3 Kuaman		1	
11	Ibu Uti	RT 01	2 Orang	Jawa	Kauman 2A		1	
12	Bapak Suhada	RT 01	4 Orang	Jawa	Kauman 2A		1	
13	Bapak Bagus	RT 01	3 Orang	Jawa	Kauman 2A			1



Peta 4. Keteraturan Bangunan Rumah



Peta 5. Kondisi Bangunan Rumah

D. Merumuskan Arah Penanganan Permukiman Kumuh Di RW.03, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen

Dari karakteristik permukiman kumuh (sasaran 1) dan tingkat kekumuhan (sasaran 2) diketahui bahwa, variabel kondisi bangunan gedung, drainase, suplai air bersih, jaringan jalan, persampahan, jaringan air limbah dan

sanitasi merupakan indikator yang membentuk permukiman pada RW 03, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen. Untuk merumuskan arahan penanganan permukiman kumuh menggunakan output sasaran 2 dengan arahan pada tiap variabel.

Tabel 9. Karakteristik Dan Tingkat Kekumuhan Permukiman

Variabel	Karakteristik	Tingkat Kekumuhan
Bangunan Gedung	Pada tiap RT, dari RT 1 hingga RT 6 diketahui bahwa tingkat kepadatan bangunan sangat tinggi dengan tingkat kepadatan bangunan 167 – 219/Ha. Bangunan permanen dengan kondisi buruk sebanyak 26 bangunan (7%), terbanyak di RT 06 sebanyak 6 rumah.	Dari hasil kuesioner dengan jumlah responden 50, memilih kondisi bangunan gedung di RW 03 dengan tingkat kumuh sedang 40 responden.s
Jalan Lingkungan	Jaringan jalan di Kelurahan Kauman RW 03 memiliki jalan yang cukup baik dikarenakan memiliki jaringan jalan yang sempit dan memiliki lebar 1,5 M dan memiliki jenis jalan dengan perkerasan jalan semen yang membuat jalanan di Kelurahan Kauman RW 03 memiliki akses yang minim.	Dari hasil kuesioner dengan jumlah responden 50, memilih kondisi jalan lingkungan di RW 03 dengan tingkat kumuh sedang 40 responden dan kumuh rendah 10 responden.

Variabel	Karakteristik	Tingkat Kekumuhan
Penyediaan Air Minum	Disetiap rumah warga dari RT 01 sampai RT 06 menggunakan PDAM dan sumur galian dan memiliki kondisi yang cukup baik, Namun dari RT 01 sampai RT 06 hanya di RT 02 yang warganya masih banyak yang menggunakan sumur galian. Terhitung total masyarakat yang menggunakan sumur sebanyak 20 rumah.	Dari hasil kuesioner dengan jumlah responden 50, memilih kondisi penyediaan air minum di RW 03 dengan tingkat kumuh sedang 20 responden dan kumuh rendah 30 responden
Drainase Lingkungan	Berdasarkan data yang diambil Jaringan drainase di Kelurahan Kauman RW 03 memiliki jaringan drainase yang cukup sedang dari fungsinya. Drainase yang dipakai di Kelurahan Kauman RW 03 memakai 2 jenis drainase yakni tersier dan sekunder yang lebarnya masing-masing 2,5 M dan 1 M	Dari hasil kuesioner dengan jumlah responden 50, memilih kondisi drainase lingkungan di RW 03 dengan tingkat kumuh sedang 25 responden dan kumuh rendah 25 responden
Pengelolaan Air Limbah	Jaringan Air Limbah Dan Sanitasi dari RT.01 sampai RT.06, bahwa di setiap rumah sudah memiliki MCK, rata-rata kondisi MCK yang ada dilingkungan warga di Kelurahan Kauman memiliki kondisi yang cukup baik, namun ada beberapa dari MCK warga yang limbahnya dibuang ke sungai contohnya RT 02.	Dari hasil kuesioner dengan jumlah responden 50, memilih kondisi pengelolaan air limbah di RW 03 dengan tingkat kumuh sedang 20 responden dan kumuh rendah 30 responden
Pengelolaan Persampahan	Jaringan persampahan yang ada RT.01 sampai dengan RT.06,rata-rata kondisi tempat sampah yang ada dilingkungan warga memiliki kondisi yang cukup baik, Jaringan persampahan di Kelurahan Kauman RW 03 memiliki sistem pengangkutan yang cukup baik	Dari hasil kuesioner dengan jumlah responden 50, memilih kondisi pengelolaan persampahan di RW 03 dengan tingkat kumuh sedang 25

Arahan penanganan terhadap permukiman kumuh adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencegah pembentukan, pertumbuhan, atau memperbaiki permukiman kumuh. Permukiman kumuh seringkali disebut juga sebagai

permukiman tidak teratur atau permukiman ilegal, dan biasanya terkait dengan masalah seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kurangnya fasilitas dasar, sanitasi yang buruk, dan akses terbatas terhadap layanan publik. Penanganan permukiman kumuh memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya dan menciptakan komunitas yang lebih berkelanjutan.

Setelah pentabelan pada variabel karakteristik dan tingkat kekumuhan pada RW 03 kelurahan Kauman, selanjutnya dilakukan perumusan arahan penanganan. Arahan penanganan dilakukan pada tiap variabel permukiman serta berdasarkan pada tingkat kekumuhan permukiman yang sudah identifikasi pada RW 03 kelurahan Kauman. Perumusan arahan penanganan ditujukan pada arahan untuk pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas kondisi permukiman. Kerja sama antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta dapat membantu mengidentifikasi solusi yang efektif dalam mencegah dan mengatasi permukiman kumuh.

Tabel 10. Arahan Penanganan Permukiman Kumuh RW 03

Pemerintah	Masyarakat
1. Mengembangkan kebijakan tata ruang dan zonasi yang mempertimbangkan kebutuhan penduduk miskin dan mencegah pembentukan permukiman ilegal.	Menjaga kebersihan dan perawatan bangunan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal.
2. Pemugaran dapat dilakukan dengan perbaikan rumah, prasarana, sarana	

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan 3 tahapan penelitian yaitu mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh yang terdapat pada RW 03, dalam penelitian ini terdapat 8 variabel yang juga menjadi input (faktor) pada tahap analisa selanjutnya dan mengidentifikasi tingkat kekumuhan yang terdapat pada RW 03 dan kemudian dilanjutkan dengan analisa kebijakan dalam menyusun arahan penanganan permukiman kumuh di RW 03.

1. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan 3 tahapan penelitian yaitu mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh yang terdapat pada RW 03, dalam penelitian ini terdapat 8 variabel yang juga menjadi

input (faktor) pada tahap analisa selanjutnya dan mengidentifikasi tingkat kekumuhan yang terdapat pada RW 03 dan kemudian dilanjutkan dengan analisa kebijakan dalam menyusun arahan penanganan permukiman kumuh di RW 03.

2. Hasil identifikasi hasil tingkat kekumuhan di RW 03 kelurahan Kauman adalah kondisi bangunan gedung dilokasi penelitian adalah kondisi kumuh sedang, kondisi jalan lingkungan dilokasi penelitian adalah kondisi kumuh sedang, kondisi penyediaan air minum dilokasi penelitian adalah kondisi kumuh sedang, kondisi drainase lingkungan dilokasi penelitian adalah kondisi kumuh sedang, kondisi pengelolaan air limbah dilokasi penelitian adalah kondisi kumuh sedang.
3. Perumusan arahan penanganan ditujukan pada arahan untuk pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas kondisi permukiman. Kerja sama antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta dapat membantu mengidentifikasi solusi yang efektif dalam mencegah dan mengatasi permukiman kumuh. Penanganan pada permukiman kumuh RW 03 kelurahan Kauman dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan akses penduduk kumuh terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan jalan, menjaga kebersihan dan perawatan bangunan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal, pemeliharaan pada sumber air bersih seperti sumur dan sumur bor, pembersihan rutin drainase dengan memperhatikan fungsi drainase, pemeliharaan dan peningkatan fungsi jaringan air limbah serta limbah dari MCK dengan tidak membuangnya ke sungai seperti RT 02. Untuk masyarakat melakukan kegiatan kerja bakti, pembersihan rutin disungai yang berada pada wilayah RW 03, kelurahan Kauman serta adanya pelarangan pembuangan sampah pada anak Sungai.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi dari hasil penelitian ini untuk pemerintah, masyarakat maupun peneliti selanjutnya akan diuraikan sebagai

berikut.

1. Pemerintah
 - Membangun kerja sama antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta dapat membantu mengidentifikasi solusi yang efektif dalam mencegah dan mengatasi permukiman kumuh.
 - Pemerintah Kota Malang serta instansi yang terkait memasukkan arahan penanganan permukiman kumuh ke dalam rencana pengembangan.
2. Masyarakat
 - Masyarakat direkomendasikan agar dapat lebih menjaga kondisi lingkungan dan permukiman di lingkungan RW 3 Kelurahan Kauman.
3. Peneliti
 - Dapat mengkaji tentang sebaran permukiman kumuh di RW 03 Kelurahan Kauman. Dengan total luas permukiman kumuh 5,37 Ha, dimana daerah dekat bantaran sungai masih sering masyarakat RW 03 terlebihnya RT 03 masih sering membuang sisa limbah di sungai.
 - Dapat mengkaji tentang identifikasi sebaran rumah tidak layak huni di kecamatan Klojen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahrishar, M., & Sulistyarto, H. (2019). *Arahan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin Sebagai Upaya Pembentukan Identitas Kawasan*. *Jurnal Teknik ITS*, 7(2).
<https://doi.org/10.12962/J23373539.V7i2.36424>
- Ardi, A., & Rahmawati, D. (2019). *Arahan Penataan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Kedungcowek Surabaya Menggunakan Konsep Land Readjustment*. *Jurnal Teknik ITS*, 7(2).
<https://doi.org/10.12962/J23373539.V7i2.33914>
- Erviyanto, W., & Felasari, S. (2019). *Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan Di Perkotaan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fadillah, B. A., Sasongko, W., Nyoman, I., & Wijaya, S. (2022). *Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat Kekumuhan Di Desa Karangasih, Kabupaten Bekasi*. *Planning For Urban Region And Environment*, 11(4), 129–138.
- Fitria, N., & Setiawan, R. P. (2014). *Identifikasi Karakteristik Lingkungan Ukuman Kumuh Di Kelurahan Kapuk,*

- Jakarta Barat. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).*
- Handryant, A. N. (2011). Permukiman Kumuh, Sebuah Kegagalan Pemenuhan Aspek Permukiman Islam. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.*
- Pabubung, Y. (2022). Arahana Penanganan Permukiman Kumuh Di Desa Balantang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.*
- Rahman, M. A. (2018). Arahana Penanganan Permukiman Kumuh Pada Kawasan Pesisir Kota Gorontalo. 372(2), 2499–2508.*